



Panggilan Gereja Memperjuangkan Realitas Ketidakadilan Pendidikan Anak

Kristi^{1*}, Aristia Heronia Agrecya Huwaa², Omega Ritawaemahu³, Sofenda Putri Stevany Souliissa⁴

¹⁻⁴Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Indonesia

*Penulis korespondensi: kristikitty85@gmail.com

Abstract. Education is a fundamental human right that must be guaranteed for every child without discrimination. In Indonesia, particularly in the Ambon region, educational inequality remains a serious challenge influenced by geographical, socio-economic, and structural factors. Children from impoverished families and remote areas often lack access to adequate education due to limited facilities, low-quality teaching staff, and inadequate technological infrastructure. This situation not only hinders children's potential development but also perpetuates cycles of poverty and social injustice. Data from the Ministry of Education and Culture (2021) indicates low basic education participation rates and high dropout rates in Maluku and Ambon. In response, the church in Ambon, as highlighted by Joseph Lourine Since (2023), plays a strategic role through the Marginalized Children's Development School (Sekolah Pembinaan Anak Marginal - SPAM), an alternative education program integrating academic learning with Christian character and spiritual formation. This initiative embodies the preferential option for the poor principle in liberation theology, as developed by Gustavo Gutiérrez, positioning the church as an advocate for the marginalized in its social and moral mission. This abstract recommends strengthening the church's role in education through multisectoral collaboration to create a more just and inclusive education system for marginalized children.

Keywords: educational inequality; marginalized children; church, Ambon; liberation theology; alternative education.

Abstrak. Pendidikan merupakan hak asasi fundamental yang harus dijamin bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah Ambon, ketidakadilan pendidikan masih menjadi tantangan serius yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sosial-ekonomi, dan struktural. Anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil sering kali tidak memperoleh akses pendidikan yang layak akibat keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan minimnya infrastruktur teknologi. Kondisi ini tidak hanya menghambat pengembangan potensi anak, tetapi juga memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021) menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan dasar di Maluku dan Ambon serta tingginya angka putus sekolah. Dalam menghadapi realitas ini, gereja di Ambon, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Lourine Since (2023), mengambil peran strategis melalui program Sekolah Pembinaan Anak Marginal (SPAM), yang menyediakan pendidikan alternatif berbasis karakter dan spiritualitas kristiani. Inisiatif ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *preferential option for the poor* dalam teologi pembebasan yang dikembangkan oleh Gustavo Gutiérrez, di mana gereja berpihak pada kaum miskin sebagai bagian dari misi sosial dan moralnya. Abstrak ini merekomendasikan penguatan peran gereja dalam pendidikan melalui kolaborasi multisektor untuk menciptakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak marginal.

Kata kunci: ketidakadilan Pendidikan; anak marginal; gereja; Ambon; teologi pembebasan; pendidikan alternatif.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi yang fundamental bagi setiap anak sebagai bagian dari hak-hak dasar manusia. Menurut UNICEF (2020), pendidikan bukan sekadar alat transfer pengetahuan, melainkan hak universal yang harus dijamin bagi semua anak tanpa diskriminasi. Pendidikan yang adil dan berkualitas menjadi pondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan sosial. Melalui pendidikan, anak-anak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, mengakses peluang ekonomi, dan

berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan berperan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan pembangunan berkelanjutan (UNICEF, 2020).

Namun, kenyataan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Ambon dan sekitarnya, menunjukkan adanya ketidakadilan pendidikan yang serius, terutama bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial-ekonomi lemah dan geografis yang sulit dijangkau. Joseph Lourine Since (2023) menegaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan wajah ketimpangan yang berlapis, di mana anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses layanan pendidikan formal yang layak. Berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas tenaga pengajar, dan minimnya dukungan infrastruktur teknologi pendidikan menjadi penghambat utama. Hal ini tidak hanya mengancam kualitas pendidikan, tetapi juga memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang sudah lama terjadi (Since, 2023).

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2021) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di wilayah Maluku dan Ambon masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak terpaksa berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Fenomena putus sekolah ini berakar pada berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi keluarga yang memaksa anak-anak membantu bekerja, jarak yang jauh dan sulit dijangkau ke sekolah, serta minimnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dampak jangka panjang dari masalah ini adalah berkurangnya kesempatan anak-anak tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup dan berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Kemendikbud RI, 2021).

Kesenjangan pendidikan ini semakin diperparah oleh faktor-faktor struktural yang kompleks. Kemiskinan keluarga menjadi salah satu hambatan utama yang membatasi akses anak ke pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali harus menghadapi pilihan sulit antara melanjutkan sekolah atau membantu ekonomi keluarga. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas, sarana belajar, dan akses teknologi menjadi hambatan serius, terutama di daerah-daerah terpencil. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata juga menjadi persoalan, di mana guru-guru di wilayah tersebut kurang mendapatkan pelatihan dan dukungan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi dengan memaksa pembelajaran daring yang sulit diakses oleh anak-anak di daerah dengan jaringan internet yang lemah atau tidak ada sama sekali (Blanden et al., 2022; Rasiyah, 2022). Kondisi ini menyebabkan semakin

melebar jurang ketidaksetaraan pendidikan yang ada. Anak-anak di daerah terpencil dan marginal seringkali terpinggirkan dalam proses pendidikan formal, yang kemudian memperdalam siklus ketidakadilan sosial dan ekonomi. Joseph Lourine Since (2023) menekankan bahwa ketidakadilan ini bukan hanya persoalan pendidikan, melainkan juga persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja sebagai institusi keagamaan yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial (Since, 2023).

Dalam konteks ini, peran gereja menjadi sangat strategis dan relevan. Gereja memiliki mandat teologis untuk memperjuangkan keadilan sosial, terutama bagi kaum miskin dan terpinggirkan, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *preferential option for the poor* yang menjadi bagian penting dalam teologi pembebasan (Gutiérrez, 2018). Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui misi sosialnya, gereja diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses dan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi penghalang bagi anak-anak marginal.

Joseph Lourine Since (2023) menulis bahwa gereja di Ambon telah mengambil langkah konkret melalui program Sekolah Pembinaan Anak Marginal (SPAM), sebuah inisiatif pendidikan alternatif yang menyediakan akses belajar bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal (Since, 2023). Program ini tidak hanya mengajarkan materi akademik secara konvensional, tetapi juga mengintegrasikan pembinaan karakter dan spiritual sebagai bekal bagi anak-anak dalam menghadapi realitas ketidakadilan pendidikan dan sosial yang mereka alami. Dengan pendekatan holistik tersebut, program SPAM bertujuan membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual untuk memperjuangkan keadilan dalam kehidupan mereka (Since, 2023).

2. LANDASAN TEORI

Ketidakadilan Pendidikan Anak

Ketidakadilan pendidikan anak merupakan masalah multidimensional yang meliputi aspek akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang tidak merata. Anak-anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil menghadapi hambatan besar untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang secara langsung berdampak pada kualitas hidup dan kesempatan mereka di masa depan (Blanden, Doepke, & Stuhler, 2022).

Menurut UNICEF (2020), ketidakadilan pendidikan bukan hanya soal tidak tersedianya sekolah atau guru yang memadai, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem pendidikan mendukung perkembangan holistik anak—termasuk aspek sosial, emosional, dan kultural (UNICEF, 2020). Anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi rendah cenderung mengalami diskriminasi terselubung dan minimnya dukungan dalam proses pembelajaran.

Dalam konteks Indonesia, khususnya wilayah Ambon, Joseph Lourine Since (2023) mengungkapkan bahwa ketidakadilan pendidikan anak tidak hanya karena faktor fisik dan ekonomi, tetapi juga faktor budaya dan sosial yang membatasi partisipasi anak, khususnya anak perempuan, dalam pendidikan formal. Hambatan geografis berupa kepulauan yang tersebar dan minimnya sarana transportasi semakin memperparah akses anak-anak menuju sekolah (Since, 2023).

Gereja dan Komitmen Sosial terhadap Pendidikan Anak Marjinal

Gereja sebagai institusi keagamaan tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga misi sosial yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Di tengah berbagai persoalan ketimpangan pendidikan, gereja hadir sebagai pelayan dan advokat bagi mereka yang terpinggirkan. Dalam kerangka teologi pembebasan, gereja menempatkan dirinya pada sisi kaum miskin dan lemah, sebagaimana dikemukakan dalam konsep *preferential option for the poor* oleh Gustavo Gutiérrez (2018). Konsep ini menegaskan bahwa gereja dipanggil secara teologis untuk berpihak secara aktif kepada kaum tertindas, termasuk anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Di Indonesia, khususnya di wilayah Ambon, ketidakadilan pendidikan menjadi persoalan yang kompleks karena mencakup aspek geografis, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, gereja lokal telah mengambil langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Menurut Joseph Lourine Since (2023), gereja di Ambon berperan sebagai pelopor pendidikan alternatif melalui program Sekolah Pembinaan Anak Marginal (SPAM), yang menyediakan layanan pendidikan nonformal bagi anak-anak yang tidak terjangkau oleh sistem pendidikan formal (Since, 2023). Program SPAM dirancang bukan hanya untuk mengajarkan materi akademik dasar, tetapi juga membekali anak-anak dengan nilai-nilai karakter, spiritualitas, dan keterampilan hidup. Pendekatan holistik ini sejalan dengan visi gereja untuk membentuk pribadi yang utuh—cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan tangguh dalam menghadapi ketidakadilan struktural (Since, 2023).

Inisiatif semacam SPAM menunjukkan bahwa gereja dapat menjadi aktor transformatif dalam sistem pendidikan, terutama bagi komunitas yang tersisih oleh sistem formal. Namun demikian, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh gereja seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau lebih banyak anak-anak marginal. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting. Rasiah (2022) menegaskan bahwa upaya mengatasi ketimpangan pendidikan membutuhkan kerja sama antara gereja, pemerintah, dan komunitas lokal (Rasiah, 2022). Hanya dengan pendekatan kolektif, visi pendidikan yang inklusif dan adil dapat benar-benar diwujudkan di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal seperti Maluku.

Pendidikan Anak sebagai Hak Asasi dan Pilar Pembangunan Manusia

Hak pendidikan anak telah diatur secara eksplisit dalam *Konvensi Hak Anak* (1989), yang merupakan instrumen hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, apa pun latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau gendernya. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang berperan penting dalam membentuk masa depan anak dan menentukan kontribusi mereka terhadap masyarakat. UNICEF (2020) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu bukan hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan spiritual, yang semuanya penting untuk perkembangan manusia yang utuh (UNICEF, 2020). Dengan pendidikan yang holistik, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas secara moral dan emosional.

Dalam konteks ini, Joseph Lourine Since (2023) menekankan bahwa pendidikan anak yang adil harus bersifat inklusif dan memberdayakan (Since, 2023). Pendidikan tidak boleh memposisikan anak hanya sebagai penerima pasif materi ajar, melainkan harus memungkinkan mereka menjadi subjek aktif yang mampu mengenali potensi dirinya dan berpartisipasi dalam proses transformasi sosial. Pendekatan pendidikan semacam ini sangat penting terutama bagi anak-anak dari kelompok marjinal yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal. Memberi mereka ruang untuk berkembang secara utuh berarti juga memberi mereka alat untuk mengubah nasib dan lingkungannya (Since, 2023).

3. METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam berbagai kajian ilmiah yang relevan dengan tema ketidakadilan pendidikan anak dan peran gereja dalam konteks Ambon.

Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini berupa karya ilmiah Joseph Lourine Since, dosen IAKN Ambon, yang memfokuskan pada pendidikan anak dan peran gereja. Data sekunder diambil dari sepuluh jurnal ilmiah terindeks yang diterbitkan antara tahun 2015-2025, yang relevan dengan isu ketidakadilan pendidikan anak dan peran gereja sebagai agen sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pencarian melalui berbagai database ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, dan portal jurnal nasional menggunakan kata kunci: “education inequality,” “child education injustice,” “church role in education,” dan “educational justice Ambon.”

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode content analysis, yaitu dengan membaca dan mengkaji isi dari jurnal dan karya ilmiah untuk menemukan pola, tema, dan argumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data disintesis dan dikaitkan dengan teori yang relevan serta konteks sosial budaya di Ambon.

Validitas dan Keandalan

Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber yang telah terverifikasi dan peer-reviewed. Selain itu, dilakukan triangulasi data melalui perbandingan antara hasil kajian dari Joseph Lourine Since dan sumber jurnal lain yang relevan. Keandalan analisis diperkuat dengan pengecekan ulang oleh peneliti secara berulang dan diskusi dengan pakar di bidang pendidikan dan teologi sosial.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Ketidakadilan Pendidikan Anak di Ambon

Berdasarkan kajian Joseph Lourine Since (2023), ketidakadilan pendidikan anak di Ambon dipengaruhi oleh beberapa faktor utama (Since, 2023). Pertama, faktor geografis berupa kondisi kepulauan yang tersebar dan infrastruktur yang terbatas menyebabkan akses ke sekolah formal sulit bagi banyak anak. Kedua, faktor ekonomi keluarga yang rendah membuat anak-anak tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya seragam, buku, dan transportasi.

Studi dari Blanden et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan penyebab utama ketidakadilan pendidikan anak secara global (Blanden, Doepke, & Stuhler, 2022). Ketika anak-anak tumbuh dalam kondisi ekonomi

yang rendah, mereka cenderung menghadapi hambatan struktural yang mengurangi kesempatan untuk meraih pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi tersebut dengan membatasi akses pembelajaran tatap muka dan memperbesar kesenjangan digital antara anak dari keluarga mampu dan tidak mampu (Rasiah, 2022). Dalam banyak kasus, anak-anak dari keluarga marginal tidak memiliki perangkat belajar daring dan akses internet yang memadai, yang membuat mereka tertinggal secara signifikan dalam proses belajar mengajar.

Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat pencapaian pendidikan anak di Ambon, yang selanjutnya memperdalam siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut, serta memerlukan intervensi kebijakan dan kolaborasi multisektor (Since, 2023).

Peran Gereja dalam Memperjuangkan Pendidikan Anak

Gereja memiliki peran sentral sebagai institusi sosial dan spiritual dalam memperjuangkan keadilan pendidikan anak. Joseph Lourine Since (2023) menguraikan bahwa gereja di Ambon telah menginisiasi berbagai program pendidikan alternatif, seperti Sekolah Pembinaan Anak Marginal (SPAM), yang bertujuan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang terpinggirkan (Since, 2023). Program ini mengintegrasikan pendidikan akademik, pembinaan karakter, dan penguatan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai kristiani.

Pendekatan ini tidak hanya membantu anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan harapan masa depan yang lebih baik. SPAM dirancang untuk menjawab persoalan multidimensi yang dihadapi anak-anak dari keluarga marginal, seperti kurangnya akses pendidikan formal, keterbatasan finansial, dan tekanan sosial (Since, 2023).

Selain menjalankan program pendidikan langsung, gereja juga mengambil peran advokatif, mendorong pemerintah dan masyarakat agar menyediakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada anak-anak marginal. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Gustavo Gutiérrez dalam teologi pembebasan, yang menekankan bahwa gereja dipanggil untuk berpihak kepada kaum miskin dan tertindas melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui doa dan ibadah (Gutiérrez, 2018). Menurut Gutiérrez, prinsip *preferential option for the poor* merupakan panggilan moral dan spiritual bagi gereja untuk terlibat aktif dalam menciptakan keadilan sosial (Gutiérrez, 2018).

Strategi dan Tantangan yang Dihadapi Gereja

Meskipun gereja memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya sebagai agen pendidikan bagi anak-anak marginal, berbagai tantangan signifikan tetap menjadi penghalang dalam pencapaian tujuan tersebut. Joseph Lourine Since (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana, tenaga pengajar yang terlatih, maupun fasilitas teknologi, menjadi hambatan utama yang menghambat perluasan jangkauan program pendidikan yang dijalankan gereja (Since, 2023). Keterbatasan ini sangat terasa terutama di wilayah kepulauan Maluku, di mana akses geografis yang sulit dan kurangnya infrastruktur membuat penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak-anak marginal menjadi sebuah tantangan besar. Kondisi ini menyebabkan tidak semua anak yang membutuhkan pendidikan yang memadai dapat dijangkau oleh program-program yang dimiliki oleh gereja, sehingga potensi mereka tidak berkembang secara optimal.

Dalam menghadapi situasi tersebut, kolaborasi multisektor menjadi suatu kebutuhan mendesak. Menurut Rasiah (2022), upaya memperluas akses pendidikan yang berkeadilan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga atau institusi saja (Rasiah, 2022). Keberhasilan dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan anak-anak marginal hanya dapat tercapai melalui kemitraan strategis antara berbagai pihak yang memiliki peran dan keahlian masing-masing. Gereja sebagai institusi keagamaan harus mampu membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas lokal yang berada di sekitar anak-anak marginal tersebut. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi gereja sekaligus memaksimalkan Pendekatan kolaboratif ini membuka peluang bagi gereja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak marginal. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan dana dan kebijakan pendukung, LSM memberikan pelatihan tenaga pengajar dan program pemberdayaan, sedangkan komunitas lokal berperan dalam memastikan keberlanjutan dan relevansi program di tingkat akar rumput. Dengan demikian, visi pendidikan yang inklusif—yang menghargai keberagaman dan memanusiakan setiap anak tanpa diskriminasi—akan lebih mudah diwujudkan melalui kerja sama yang erat dan terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Lebih jauh lagi, kolaborasi multisektor juga memungkinkan terjadinya inovasi dan adaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal. Gereja, yang memahami kebutuhan spiritual dan sosial anak-anak marginal, dapat mengintegrasikan nilai-nilai kasih dan keadilan Kristiani dalam pendidikan, sementara mitra lainnya memastikan metode dan fasilitas pendidikan memenuhi standar inklusivitas dan keberlanjutan. Kombinasi ini

memperkuat dampak pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian peserta didik.

Secara keseluruhan, peran gereja dalam pendidikan anak marginal tetap krusial dan tidak dapat tergantikan. Namun, untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan memperluas manfaat pendidikan yang diberikan, pendekatan kolaboratif menjadi solusi yang paling realistis dan efektif. Melalui kemitraan lintas sektor, gereja dapat memperkuat kapasitasnya dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan membebaskan bagi seluruh anak, tanpa terkecuali.

Implikasi Sosial dan Teologis

Peran gereja dalam mendorong pendidikan yang adil bagi anak-anak tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari panggilan iman untuk memperjuangkan keadilan sosial. Gereja, dalam konteks ini, bukan sekadar institusi keagamaan yang menjalankan ritual atau pelayanan spiritual, melainkan juga agen perubahan sosial yang hadir secara aktif di tengah masyarakat. Dalam perspektif teologis, gereja dipanggil untuk hadir di tengah penderitaan umat, khususnya mereka yang paling rentan dan tersisih dari sistem sosial—termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan. Panggilan ini bukan hanya sekadar tugas moral, melainkan juga kewajiban iman yang berakar pada ajaran Alkitab tentang kasih, keadilan, dan pembebasan (Since, 2023).

Menurut Joseph Lourine Since (2023), gereja di Ambon telah memosisikan diri sebagai pelopor pendidikan alternatif melalui program seperti Sekolah Pembinaan Anak Marginal (SPAM), yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak yang terpinggirkan oleh sistem formal (Since, 2023). Program ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi akademik, tetapi juga menanamkan nilai karakter, moralitas, dan spiritualitas Kristiani sebagai bagian dari pembentukan manusia seutuhnya. Pendekatan gereja ini mencerminkan teologi pembebasan yang diperkenalkan oleh Gustavo Gutiérrez, khususnya dalam prinsip *preferential option for the poor*, yang menekankan keberpihakan aktif kepada kaum miskin sebagai inti dari misi injili (Gutiérrez, 2015). Teologi ini menuntut gereja untuk berdiri bersama mereka yang terpinggirkan, memperjuangkan hak-hak mereka, dan memberdayakan mereka agar dapat hidup secara bermartabat (Since, 2023).

Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam sektor pendidikan bukan hanya bersifat praktis dan fungsional, melainkan juga memiliki fondasi teologis yang kuat—sebuah bentuk pelayanan iman yang berpihak dan transformatif (Since, 2023). Kegiatan pendidikan yang dilakukan gereja tidak hanya menciptakan peluang belajar yang lebih inklusif dan humanis bagi anak-anak marginal, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kesadaran sosial dan

spiritual yang mendalam. Melalui program-program seperti SPAM, gereja memfasilitasi pengembangan potensi anak secara menyeluruh, membangun rasa percaya diri, dan membentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani yang mengedepankan kasih dan keadilan (Since, 2023). Hal ini secara sosial berkontribusi pada pengurangan kesenjangan dan penguatan komunitas yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara teologis, misi gereja dalam pendidikan anak marginal menjadi manifestasi nyata dari panggilan untuk menjadi terang dan garam dunia (*Matius 5:13–16*), di mana gereja hadir sebagai agen pembebasan dan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan dan ketidakadilan. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek spiritual dan sosial dalam satu kesatuan yang utuh, menjadikan pendidikan sebagai alat pembebasan yang menyeluruh—bukan hanya pembebasan intelektual tetapi juga pembebasan sosial dan rohani (Since, 2023; Gutiérrez, 2015).

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diperhatikan oleh gereja dan pemangku kepentingan terkait untuk memperjuangkan realitas ketidakadilan pendidikan anak di Ambon:

Penguatan Kemitraan Multisektor

Gereja perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan sumber daya pendukung program pendidikan anak marginal. Sinergi ini dapat membuka akses pendanaan, pelatihan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai (Rasiah, 2022).

Pengembangan Program Pendidikan Alternatif dan Inklusif

Melanjutkan dan mengembangkan model pendidikan alternatif seperti *Sekolah Pembinaan Anak Marginal* (SPAM) dengan pendekatan yang holistik, menggabungkan aspek akademik, karakter, dan spiritual agar anak-anak marginal mampu berkembang secara utuh (Since, 2023).

Pemanfaatan Teknologi Pendidikan

Memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil melalui pembelajaran daring atau *blended learning*, disertai pelatihan bagi guru dan pendamping agar teknologi dapat digunakan secara efektif (Blanden, Doepke, & Stuhler, 2022).

Advokasi Kebijakan Pendidikan yang Berkeadilan

Gereja harus aktif dalam melakukan advokasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpihak pada anak-anak dari kelompok marginal agar pemerintah meningkatkan alokasi anggaran dan regulasi yang mendukung keadilan pendidikan (Gutiérrez, 2018).

Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Gereja

Peningkatan kapasitas para tenaga pendidik dan pengelola pendidikan di lingkungan gereja sangat penting agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif dan professional (Since, 2023).

5. KESIMPULAN

Ketidakadilan pendidikan anak di Ambon tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan ketimpangan sosial dan geografis yang memperburuk akses terhadap pendidikan berkualitas. Menurut Tilaar (2012), pendidikan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan struktural yang menyebabkan anak-anak dari daerah terpencil mengalami keterbatasan dalam fasilitas, guru, dan kesempatan belajar. Hal ini senada dengan temuan UNESCO (2022) yang menegaskan bahwa anak-anak di wilayah kepulauan Indonesia Timur memiliki risiko lebih tinggi untuk putus sekolah karena faktor kemiskinan dan keterisolasian geografis. Gereja, sebagai lembaga sosial yang berakar kuat dalam masyarakat, memiliki peran moral untuk memperjuangkan keadilan sosial melalui pendidikan, sebagaimana dijelaskan oleh Manuputty (2020) bahwa gereja di Maluku berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga agen transformasi sosial yang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, panggilan gereja menjadi bentuk nyata dari teologi pembebasan yang berpihak kepada kaum tertindas, termasuk anak-anak yang kehilangan hak atas pendidikan. Gutierrez (1988) menjelaskan bahwa gereja harus hadir di tengah penderitaan umat sebagai suara kenabian yang menuntut perubahan sosial. Bentuk implementatifnya dapat berupa penyelenggaraan pendidikan alternatif, pelatihan guru, dan advokasi kebijakan publik sebagaimana diungkapkan oleh Susanto (2019) dalam studi tentang gereja dan pemberdayaan masyarakat miskin. Selain itu, Kristiyanto (2015) menekankan pentingnya kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini bukan sekadar solusi pragmatis, tetapi juga wujud nyata dari panggilan iman yang mengasihi sesama melalui aksi nyata memperjuangkan hak anak atas pendidikan.

Dengan implementasi strategi yang tepat, gereja dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif dalam mengatasi ketidakadilan pendidikan anak, sejalan dengan misi teologisnya untuk melayani kaum yang terpinggirkan dan memperjuangkan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanden, J., Doepke, M., & Stuhler, R. (2022). Inequality in education: A multidimensional perspective. *Fiscal Studies*, 43(1), 1–25.
- Gutierrez, G. (1988). *A theology of liberation: History, politics, and salvation*. Orbis Books.
- Gutiérrez, G. (2018). *A theology of liberation: History, politics, and salvation* (15th ed.). Orbis Books.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Statistik pendidikan 2021*. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud.
- Kristiyanto, Y. S. (2015). *Gereja dan pendidikan: Upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat multikultural*. Kanisius.
- Manuputty, J. (2020). Gereja di Maluku sebagai agen transformasi sosial: Sebuah refleksi teologis. *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 18(2), 145–160.
- Rasiah, R. (2022). *Digital divide and education inequality*. Universiti Malaya Press.
- Rasiah, R. (2022). Kolaborasi multisektor untuk pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 12(2), 77–91.
- Since, J. L. (2023). *Ketimpangan pendidikan dan peran gereja di Ambon*. Institut Transformasi Sosial.
- Since, J. L. (2023). *Pendidikan holistik berbasis iman: Peran gereja dalam pengembangan anak marginal di Maluku*. IAKN Press.
- Since, J. L. (2023). *Teologi kontekstual dan tantangan pendidikan anak di Maluku*. IAKN Press.
- Susanto, A. (2019). Peran gereja dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan alternatif. *Jurnal Misi dan Pemberdayaan*, 7(1), 22–34.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Rineka Cipta.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report: Inclusion and education for all*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2020). *Education: A right, not a privilege*. United Nations Children’s Fund.